

THE EFFECT OF APARATUR COMPETENCY, ORGANIZATIONAL COMMITMENT, UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY, COMMUNITY PARTICIPATION AND INTERNAL CONTROL SYSTEM OF THE ACCOUNTABILITY OF VILLAGE MANAGEMENT IN KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Siti Sarah¹, Taufeni Taufik², Devi Safitri³

^{1,2&3}Universitas Riau

Email : sitisarahsss157@gmail.com^{1*}, taufentaufik94962@gmail.com², devisafitri@lecturer.unri.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of the The Effect of Aparatur Competency, Organizational Commitment, Utilization of Information Technology, Community Participation and Internal Control systems of the Accountability of Village Management in Kabupaten Indragiri Hulu. The population used in this study were 16 villages in Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Batang Gansal, Kecamatan Kuala Cenaku and Kecamatan Rengat Barat. The samples in this study were village head, the village secretary, the financial affairs, the planning board, the government desk, and the head of administration and general affairs. Data collection in this research is using purposive sampling, where total respondents in this research is 96 peoples. Data analysis was done with multiple linear regression model with SPSS software 22.0 version. The results obtained that the Aparatur Competency, Organizational Commitment, Utilization of Information Technology, Community Participation and Internal Control systems have a significant effect on Accountability of Village Management.

Keywords : *Accountability of Village Management, Aparatur Competency, Organizational Commitment, Utilization of Information Technology, Community Participation, Internal Control Systems.*

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, KOMITMEN ORGANISASI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SPI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Indragiri Hulu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 16 desa di Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Batang Gansal, Kecamatan Kuala Cenaku and Kecamatan Rengat Barat. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pemerintahan dan Kaur Perencanaan dan Kaur Tata Usaha dan Umum. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, dimana total responden dalam penelitian ini berjumlah 96 responden. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan model regresi linear berganda dengan program SPSS 22. Hasil yang diperoleh dari kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, SPI.*

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dasar aturan hukum dan pemberian wewenang tersebut, maka dibentuklah pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya desa dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa yang bertujuan untuk memberdayakan desa.

Pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran kepada desa dalam bentuk dana desa untuk meningkatkan anggaran pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah telah mengucurkan dana yang cukup besar setiap tahunnya untuk diberikan kepada desa.

Tabel 1. Anggaran Dana Desa

Tahun	Jumlah Anggaran
2015	Rp. 20.700.000.000.000
2016	Rp. 46.980.000.000.000
2017	Rp. 60.000.000.000.000
2018	Rp. 60.000.000.000.000

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id

Dengan dana besar yang diberikan pemerintah untuk desa, pemerintah telah mempersiapkan peraturan agar dana desa yang diberikan dapat dikelola dan dipertanggung jawabkan dengan baik. Terdapat peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 membahas dana desa yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur tentang pengelolaan dana desa.

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit BPK Nomor 16.B/LHP/XVII.PEK/05/2018 di Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2017 menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya yaitu Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan belanja transfer bantuan keuangan ke desa Kabupaten Indragiri Hulu belum diverifikasi dan dilaporkan kepada Bupati sebesar Rp. 30.937.297.612,00.

Hasil pemeriksaan terhadap belanja transfer bantuan keuangan ke desa berupa Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi tahun 2017 menunjukkan permasalahan diantaranya masih terdapat 178 Laporan Pertanggung jawaban Dana Transfer Bantuan Keuangan ke Desa yang belum selesai diverifikasi dan dilaporkan kepada Bupati di antaranya adalah Kec. Batang Cenaku, Kec. Batang Gansal, Kec. Batang Peranap, Kec. Kelayang, Kec. Kuala Cenaku, Kec. Peranap, Kec. Rakit Kulim, dan Kec. Rengat Barat senilai Rp. 30.937.297.612,00 (BPK perwakilan Provinsi Riau).

Oleh sebab itu, untuk mampu mengurangi permasalahan dan kasus serta kerugian yang dialami negara akuntabilitas menjadi indikator penting dalam pengelolaan dana desa (Umaira, Siti, 2019). Mardiasmo (2017) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran. Menurut Aulia, Putri (2018) rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan. Desa dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk melaksanakan hak, kewenangan, dan kewajibannya dituntut agar akuntabel dan transparan. Meningkatkan besarnya jumlah dana desa yang diberikan oleh pemerintah tersebut tentunya membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga tidak akan munculnya potensi penyelewengan. Oleh sebab itu, diperlukan peran aparatur untuk membantu kepala desa dalam mengelola dana desa (Aulia, Putri, 2018).

Jadi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa adalah pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindak seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektifitas, dan

reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan (Aulia, Putri, 2018).

Dalam pengelolaan dana desa, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Faktor yang pertama yaitu kompetensi aparatur. Kompetensi Aparatur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Aulia, Putri, 2018). Hal ini sejalan dengan penelitian Medianti, Larastika (2018) yang mendefinisikan kompetensi aparatur sebagai aparatur yang memiliki kualitas sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Agustiniingsih, Maulina (2020) menyatakan bahwa kompetensi aparatur yang baik dan berkualitas akan memudahkan pengelolaan dana desa dan tercapainya tujuan pemerintah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Perdana, Khaeril Wahyu (2018) dan Widyatama, Arif (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi Aparat tidak berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor yang kedua yaitu komitmen organisasi. Menurut (Robbins and Judge, 2015) Komitmen organisasi adalah keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu dan tujuan-tujuan serta keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Medianti, Larastika (2018) dan Safrizal (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi tingkat ketepatan kerja yang dimilikinya serta semakin tinggi komitmen organisasi, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Sejalan juga dengan penelitian Wulandari, Windi (2020) dan Yulisa, Febri (2019) komitmen organisasi akan menciptakan rasa memiliki bagi pekerja terhadap organisasi tempat nya bekerja sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur. Sedangkan menurut Perdana, Khaeril Wahyu (2018) komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Aulia, Putri (2018) Komputer sebagai salah satu alat teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia, komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya, salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan desa. Sejalan dengan penelitian Perdana, Khaeril Wahyu (2018) yang menyatakan dengan sistem yang terkomputerisasi, pelaporan dana desa akan mampu dilakukan dengan cepat dan output laporan keuangannya juga lebih handal dibandingkan dengan pelaporan secara manual.

Faktor yang keempat yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhnya prinsip akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan di desa. dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang (Taufik, Taufeni, 2009).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufik, Taufeni (2009) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Dan sejalan juga dengan penelitian Aulia, Putri (2018), Medianti, Larastika (2018) dan Perdana, Khaeril Wahyu (2018) menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor lain yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sistem pengendalian internal. Pengertian Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut PP No.60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyatama, Arif (2017), dan Rosyidi, Muhammad (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan penelitian ini juga sejalan dengan Taufik, Taufeni (2017) dan Taufik, Taufeni (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dapat mencegah penipuan yang akan terjadi didalam pemerintahan serta membantu terwujudnya pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut : Apakah Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Indragiri Hulu?

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Indragiri Hulu.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan adalah suatu teori yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham (*shareholder*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang

bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik (Widyatama, Arif, 2017)

Pengertian Desa

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa pada Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan desa (APBdesa) yaitu seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Selain itu Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam sistem penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Mardiasmo (2017) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas adalah sebuah kewajiban, melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggung jawaban yang dikerjakan secara berkala.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaannya.

Kompetensi Aparatur

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (6) Kompetensi merupakan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan dalam suatu jabatan.

Sementara menurut Stephen Robbin (2013), Kompetensi adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh dua faktor yang kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

Komitmen Organisasi

Menurut Robbins dan Judge (2015) komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasi adalah suatu dorongan dari dalam diri individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi".

Sumber lain yakni Romney dan Steinbart (2015) menyatakan bahwa : Perancangan sistem informasi menggunakan teknologi informasi (*information technology*) untuk membantu mengambil keputusan menyaring dan meringkas informasi secara efektif. Teknologi informasi ini merupakan komputer dan perangkat elektronik yang digunakan untuk menyimpan, mengambil, mentransmisikan, dan memanipulasi data.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa (BPKPN, 2016). Partisipasi juga diartikan juga bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingan.

Sistem Pengendalian Internal

Pengertian Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut PP No.60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 SPI terdiri dari lima unsur, yaitu: Lingkungan pengendalian, Penaksiran risiko, Aktivitas pengendalian, Informasi dan komunikasi serta Pemantauan.

Pengembangan Hipotesis**Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Aparatur yang kompeten akan menghasilkan *output* yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Kompetensi yang baik akan meningkatkan aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dan menerapkannya dengan baik, sehingga pengelolaan dana desa menjadi semakin akuntabel. Apabila aparatur desa gagal dalam memahami hal tersebut, maka akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuatnya dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga mempengaruhi keputusan yang diambil selanjutnya serta belum mencerminkan pengelolaan yang akuntabel. Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. Hal ini sejalan dengan penelitian Aulia, Putri (2018) dan Medianti, Larastika (2018). Dan sejalan juga dengan penelitian Agustiniingsih, Maulina (2020).

H₁ : Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Robbins dan Judge (2015) komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut.

Adanya komitmen organisasi dapat mendukung pengelolaan dana desa agar program-program dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan pengelolaan dana desa yang akuntabel merupakan wujud komitmen aparatur desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa. Komitmen organisasi yang tinggi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga akan mendorong keberhasilan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Larastika, Medianti (2018), Raharjo, Niko Dwi (2018), Safrizal (2018) dan Yulisa, Febri (2019).

H₂ : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah khususnya pengelolaan dana desa. Teknologi informasi mempunyai kelebihan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan data, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dikarenakan dengan teknologi informasi data yang diolah akan mempermudah aparatur dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Aulia, Putri (2018) dan Perdana, Khaeril Wahyu (2018).

H₃ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kesejahteraan dan keberlangsungan pembangunan. Keputusan yang akan diambil oleh aparatur pemerintah haruslah melibatkan masyarakat, karena masyarakat harus terlibat secara langsung dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan, dan masyarakat dapat memberikan tanggapan kepada keputusan pemerintah agar dalam pengelolaan dan pembangunan dana desa tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan, dan agar pemerintah lebih terbuka dalam mempertanggungjawabkan segala kegiatannya (Perdana, Khaeril Wahyu, 2018). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Taufik, Taufeni (2009), Aulia, Putri (2018) dan Medianti, Larastika (2018).

H₄ : Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengertian Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut PP No.60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Sistem pengendalian internal yang memadai akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan, selain itu sistem pengendalian internal bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap penyusunan, hukum dan peraturan dalam pembuatan laporan keuangan sehingga laporan yang akan dihasilkan lebih akuntabel. Sistem pengendalian internal juga dilakukan untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam menyusun laporan keuangan, untuk menghindari dari kecurangan manipulasi angka-angka yang dapat merugikan masyarakat dan negara, serta memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Widyatama, Arif (2017), Rosyidi, Muhammad (2018), Taufik, Taufeni (2017) dan Taufik, Taufeni (2019).

H₅ : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah desa-desa di Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Batang Gansal, Kecamatan Kualu Cenaku, dan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling dimana sampel pada penelitian ini adalah para aparatur desa yang melaksanakan pengelolaan dana desa di Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Batang Gansal, Kecamatan Kualu Cenaku, dan Kecamatan Rengat Barat dimana anggota populasi sebanyak 16 yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Dimana untuk satu desa diambil 6 responden dengan kriteria Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pemerintahan dan Kaur Perencanaan dan Kaur Tata Usaha dan Umum. Jadi jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 96 responden.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan sumber data primer dimana data diperoleh langsung dari objek penelitian yang berupa kuesioner yang ditunjukkan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Pemerintahan, dan Kaur Tata Usaha dan Umum di Kabupaten Indragiri Hulu.

Metode Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2016) uji statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, dan perhitungan persentase.

Uji Kualitas Data

Uji Reabilitas

Uji reabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu menggunakan *Cronbach Alpha* (Ghozali, Imam, 2016).

Uji Validitas

Menurut Ghozali, Imam (2016) mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hingga r tabel untuk degree of freedom (df)= $n-2$, dalam ini n adalah jumlah sampel. Jadi df yang digunakan adalah $50-2=48$ dengan alpha sebesar 5% maka menghasilkan nilai r tabel (uji dua sisi) sebesar 0.2787 dengan ketentuan Hasil r hitung $\geq r$ tabel (0.2787) = valid Hasil r hitung $\leq r$ tabel (0.2787) = tidak valid. Jika r hitung (tiap butir dapat dilihat pada kolom corrected item total correlation) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati data normal. Jika terdapat data yang terdistribusi secara tidak normal maka uji statistik t tidak dapat diterapkan (Ghozali, Imam, 2016).

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel

Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SPI terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hulu (Siti Sarah, Taufeni Taufik, Devi Safitri)

independen (Ghozali, Imam, 2016). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidak samaan variabel pengganggu dari suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, Imam, 2016). Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik Uji *Scatterplot*.

Uji Regresi Linear Berganda

Untuk menguji hipotesis digunakan alat analisis regresi berganda, dengan alasan bahwa alat ini dapat digunakan sebagai model prediksi terhadap variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Untuk itu diformulasikan model regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Pengujian Hipotesis

Hipotesis ini dihitung dengan cara melakukan uji t. Uji t digunakan untuk menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak. Nilai positif atau negatif digunakan untuk menentukan arah.

Pengujian tersebut dilakukan dengan dua arah (2 tails) dengan tingkat keyakinan 95% dan dilakukan uji tingkat signifikan pengaruh hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Tingkat signifikannya ditemukan sebesar 5% dan *degree of freedom* (df) = n-1-k. Apabila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya variabel independen secara individual memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya, jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima H_1 ditolak.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antar 0 sampai 1. Semakin kecil nilai R^2 , maka semakin terbatas kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel determinannya. Penelitian ini juga menggunakan adjusted R Square (Adj R^2) karena terdapat lebih dari satu variabel independen dan apabila hanya ada satu variabel independen maka menggunakan R Square (R^2) dalam menjelaskan pengaruh variabel independennya (Ghozali, Imam, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memiliki 16 desa di Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Batang Gansal, Kecamatan Kualu Cenaku, dan Kecamatan Rengat Barat di Kabupaten Indragiri Hulu sebagai objek dengan menggunakan kuesioner sebanyak 96 buah dengan tingkat pengembalian dan dapat diolah 93,75% dan tidak kembali 6,25%.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa total skor jawaban sebesar 2555 dengan nilai minimal sebesar 630, nilai maksimal sebesar 3150, rata-rata skor sebesar 4,05 dengan standar deviasi sebesar 0,764 dan kriteria posisi 81,11%, berada pada range 84%-100%, maka termasuk kategori baik.

Kompetensi Aparatur

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa total skor jawaban sebesar 2248 dengan nilai minimal sebesar 540, nilai maksimal sebesar 2700, rata-rata skor sebesar 4,16 dengan standar deviasi sebesar 0,743 dan kriteria posisi 83,26%, berada pada range 84%-100%, maka termasuk kategori baik.

Komitmen Organisasi

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa total skor jawaban sebesar 2169 dengan nilai minimal sebesar 540, nilai maksimal sebesar 2700, rata-rata skor sebesar 4,02 dengan standar deviasi sebesar 0,709 dan kriteria posisi 80,33%, berada pada range 68%-84%, maka termasuk kategori baik.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa total skor jawaban sebesar 3010 dengan nilai minimal sebesar 720, nilai maksimal sebesar 3600, rata-rata skor sebesar 4,185 dengan standar deviasi sebesar 0,6718 dan kriteria posisi 83,61%, berada pada range 68%-84%, maka termasuk kategori baik.

Partisipasi Masyarakat

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa total skor jawaban sebesar 2187 dengan nilai minimal sebesar 540, nilai maksimal sebesar 2700, rata-rata skor sebesar 4,05 dengan standar deviasi sebesar 0,730 dan kriteria posisi 81%, berada pada *range* 68%-84%, maka termasuk kategori baik.

Sistem Pengendalian Internal

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa total skor jawaban sebesar 4539 dengan nilai minimal sebesar 1080, nilai maksimal sebesar 5400, rata-rata skor sebesar 4,20 dengan standar deviasi sebesar 0,4326 dan kriteria posisi 84,05%, berada pada *range* 68%-84%, maka termasuk kategori baik.

Hasil Uji Kualitas Data

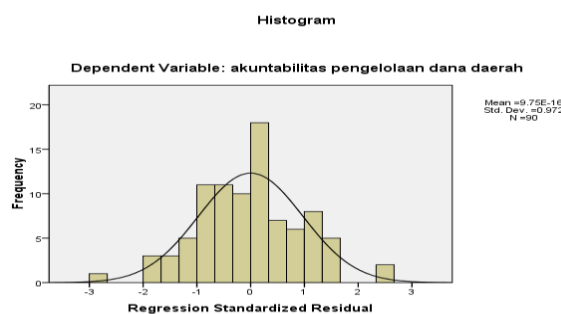
Hasil Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengujian reabilitas di atas, menunjukkan bahwa semua variabel yang dijadikan sebagai instrumen diperoleh hasil koefisien $\alpha \geq 0,6$ yang berarti data dalam penelitian ini adalah reliabel atau dapat dipercaya dan dapat digunakan sebagai alat pengumpul data.

Hasil Uji Validitas

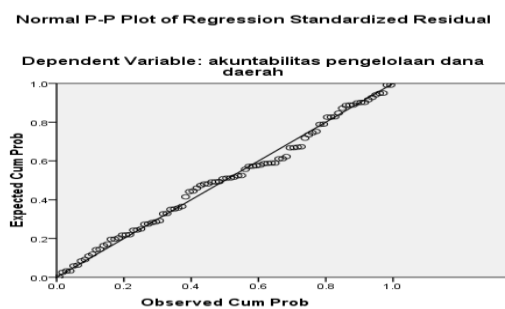
Hasil pengujian validitas data untuk semua butir pernyataan pada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal memiliki $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ ($r_{hitung} \geq 0,166$).

Hasil Uji Normalitas Data



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Data

Sumber: Data Olahan



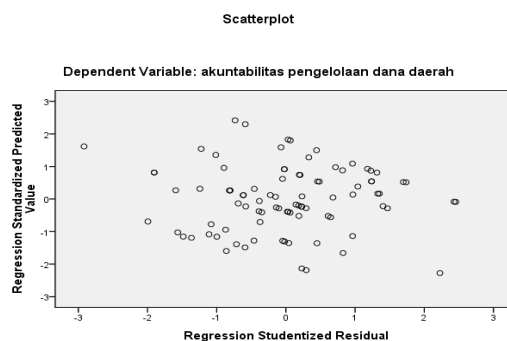
Gambar 2. Hasil Uji Normalitas Data

Sumber: Data Olahan

Dengan melihat tampilan grafik histogram, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal, karena terbentuk simetri tidak mencekung ke kiri maupun ke kanan. Dan diagram normalitas plot, data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti dan mengikuti arah garis diagonal.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil uji heteroskedastisitas



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data Olahan

Dari Gambar di atas, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar di atas dan di bawah angka 0. Oleh karena itu dapat dikatakan model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

Hasil Uji Multikolonearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolonearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kompetensi Aparatur	,678	1,475
Komitmen Organisasi	,960	1,041
Pemanfaatan Teknologi Informasi	,569	1,759
Partisipasi Masyarakat	,707	1,415
Sistem Pengendalian Internal	,617	1,620

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi untuk variabel independen yang diajukan oleh peneliti untuk diteliti bebas dari multikolonearitas. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat tabel diatas yang menunjukkan nilai Tolerance dari masing-masing variabel independen > 0,10 dan nilai VIF dari masing-masing variabel independen < 10, yang mana dapat digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Dari hasil analisis dengan bantuan program SPSS 22,0 maka dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk. Adapun persamaan regresi linier berganda, sebagai berikut:

$$Y = 1,274 + 0,440X_1 + 0,365X_2 + 0,330X_3 + 0,272X_4 + 0,228X_5 + e$$

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)**Tabel 3. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)**

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.841 ^a	.708	.690	2,236

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan Tabel di atas, nilai adjusted R square yang diperoleh sebesar 0,708 yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa yang terjadi pada sampel penelitian dipengaruhi oleh kompetensi aparatur, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 70,8% dan sisanya 29,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini seperti peran perangkat desa, transparansi dan akuntabilitas dan lain sebagainya.

Pembahasan**Hasil Pengujian Hipotesis pertama****Tabel 4. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama**

Variabel Independen	Beta	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig	Keterangan
Kompetensi Aparatur (X1)	0,440	4.886	1,9882	0,000	Berpengaruh

Sumber: Data Olahan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4.886 > 1,98827$) dengan signifikansi ($0,000 < 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Aulia, Putri (2018), Medianti, Larastika (2018) menyatakan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Agustiniingsih, Mauina, 2020) menyatakan kompetensi aparatur yang baik dan berkualitas akan memudahkan pengelolaan dana desa dan tercapainya tujuan pemerintah. Sedangkan hasil penelitian Perdana, Khaeril Wahyu (2018) dan Widyatama, Arif (2017) menyatakan bahwa kompetensi Aparat tidak berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil pengujian hipotesis kedua**Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua**

Variabel Independen	Beta	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig	Keterangan
Komitmen Organisasi(X2)	0,365	2.207	1,9882	0,030	Berpengaruh

Sumber: Data Olahan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,207 > 1,98827$) dengan signifikansi ($0,030 < 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Medianti, Larastika (2018), Raharjo, Niko Dwi (2018) dan Safrizal (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi tingkat ketepatan kerja yang dimilikinya serta semakin tinggi komitmen organisasi, maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Dan menurut Yulisa, Febri (2019) komitmen organisasi akan menciptakan rasa memiliki bagi pekerja terhadap organisasi tempat nya bekerja. Sedangkan menurut Perdana, Khaeril Wahyu (2018) komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil pengujian hipotesis ketiga**Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga**

Variabel Independen	Beta	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig	Keterangan
Pemanfaatan Teknologi Informasi(X3)	0,330	3.645	1,9882	0,000	Berpengaruh

Sumber: Data Olahan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,645 > 1,98827$) dengan signifikansi ($0,001 < 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Aulia, Putri (2018) dan Perdana, Khaeril Wahyu (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan akurat dan mempermudah aparatur dalam menjalankan pengelolaan dana desa. Sedangkan

Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SPI terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hulu (Siti Sarah, Taufeni Taufik, Devi Safitri)

menurut Mandala, Gita Silvia (2014) Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur desa.

Hasil pengujian hipotesis keempat

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Variabel Independen	Beta	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Keterangan
Partisipasi Masyarakat(X4)	0,272	2.551	1,9882	0,013	Berpengaruh

Sumber: Data Olahan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 2,551 dengan nilai signifikan sebesar 0,013 serta t_{tabel} yang memiliki nilai 1,98827. karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,551 > 1,98827$) dengan signifikansi ($0,013 < 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H_{04} ditolak dan H_{a4} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Taufik, Taufeni (2009) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangatlah penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Dan sejalan dengan penelitian Aulia (2018), Medianti, Larastika (2018) dan Perdana, Khaeril Wahyu (2018) menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan menurut Nurkhasanah (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil pengujian hipotesis kelima

Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis Kelima

Variabel Independen	Beta	t _{hitung}	t _{tabel}	Sig	Keterangan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah(X5)	0,228	3.347	1,9882	0,001	Berpengaruh

Sumber: Data Olahan

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,347 > 1,98827$) dengan signifikansi ($0,001 < 0,05$) dapat disimpulkan bahwa H_{05} ditolak dan H_{a5} diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widyatama, Arif (2017), dan Rosyidi, Muhammad (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dan sejalan dengan hasil penelitian Taufik, Taufeni (2018) dan Taufik, Taufeni (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dapat mencegah terjadinya penipuan pada pemerintah serta membantu terwujudnya pemerintahan yang baik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Edlin, Debby Nadya (2018) dan Budiati, Yuli (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan dana desa.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini, antara lain: Aparatur yang kompeten akan menghasilkan *output* yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Kompetensi yang baik akan meningkatkan aparatur desa dalam memahami tata cara pengelolaan dana desa dan menerapkannya dengan baik, sehingga pengelolaan dana desa menjadi semakin akuntabel. Oleh sebab itu, maka pemerintah desa di Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan untuk dapat meningkatkan kompetensi aparatur secara rutin dengan mengadakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan diklat-diklat yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Selain itu, Aparatur yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukannya dalam organisasi untuk mewujudkan pelayanan kepada publik agar menjadi lebih baik, hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana aparatur pengelola dana desa harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, maka pemerintah desa di Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan untuk dapat meningkatkan komitmen organisasi pada aparatur desa.

Ada pula pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah khususnya pengelolaan dana desa. Teknologi informasi mempunyai kelebihan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi datanya. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan data, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh sebab itu, maka pemerintah desa di Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan untuk dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dengan cara menggunakan perangkat lunak dalam setiap kegiatan pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa, maka masyarakat dapat memberikan tanggapan kepada keputusan yang akan di ambil pemerintah desa sehingga akan mengurangi terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan dana desa. oleh sebab itu, maka pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan atau untuk mengambil sebuah keputusan dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah.

Dan sistem pengendalian internal juga merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal yang memadai akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan, selain itu sistem pengendalian internal bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap penyusunan, hukum dan peraturan dalam pembuatan laporan keuangan sehingga laporan yang akan dihasilkan lebih akuntabel. Sistem pengendalian internal juga dilakukan untuk mengawasi kinerja pemerintah dalam menyusun laporan keuangan, untuk mencegah penipuan atau manipulasi angka-angka yang dapat merugikan masyarakat dan negara, serta memastikan akurasi dan kelengkapan informasi (Taufik, Taufeni, 2019). Oleh sebab itu, maka pemerintah desa di Kabupaten Indragiri Hulu harus meningkatkan sistem pengendalian internal dalam pemerintah dengan cara memonitoring dan mengevaluasi setiap kegiatan yang dikerjakan. Hal ini juga menyarankan peneliti lain untuk menambahkan variabel lain yang diduga mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, Maulina. 2020. *Pengaruh Good Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Bilancia (Jurnal Ilmiah Akuntansi). Vol. 4 No. 1, Maret 2020 (80-91).
- Andini, Hanni. 2018. *Penerapan Prinsip Akuntansi dan Prinsip Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta (2018).
- Anwar, Sanusi. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aulia, Putri. 2018. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten 50 Kota*. JOM FEB, Vol. 1, Edisi 1 (Januari-Juni 2018).
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2016. *Petunjuk Teknis Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan 2016*. Jakarta
- BPK Perwakilan Provinsi Riau. 2019. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru Tahun 2017*.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23(Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Hafid, Risma. 2019. *Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016*. Skripsi Universitas Hasanuddin.
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_kabupaten_indragiri_hulu
- <http://pekanbaru.tribunnews.com/2018/01/29/diduga-terjadi-penyelewengan-proyek-jalan-dan-jembatan-di-desa-siambul-dipertanyakan-warga>.
- Indrajaya, Johan Arief. 2017. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Skripsi Universitas Lampung (2017).
- Jensen, M., C. Meckling, 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure". Journal of Finance Economic.
- Ladapase, Lalita Ivana Maria. 2019. *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Motivasi Aparatur, dan Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting, dan Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka*. Skripsi Universitas Saranata Dharma (2019).
- Mardiasmo., 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Medianti, Larastika. 2018. *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa*. JOM FEB, Vol. 1 Edisi. 1 (Januari-Juni 2018)
- Nainggolan, Fatimah Azmi. 2018. *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (2018).
- Perdana, Khaeril Wahyu. 2018. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Deesa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2018).
- Raharjo, Niko Dwi. *Pengaruh Moderasi Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap Hubungan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi, Vol. 5, No. 2, April 2017 : 159-173.
- Rahman, Muh. Akil. 2017. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance*. MINDS Jurnal Manajemen Ide dan Inspirasi, Vol. 3, No. 2 (2016)

- Republik Indonesia, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (6).
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Republik Indonesia, Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang *Desa*
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa*
- Robbins, Stephen P. & Timothy, A. Judge. 2009. *Organizational Behavior*. 13 Three Edition, USA: Pearson International Edition, Prentice –Hall
- Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Indeks, Kelompok Gramedia.
- Rosyidi, Muhammad. 2018. *Pengaruh Transparansi, Kompetensi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. JOM FEB, Volume 1, Edisi 1 (Januari-Juni 2018).
- Safrizal. 2018. *Pengaruh Otonomi Desa, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi, Komitmen Aparatur Desa, Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir*. JOM FEB, Volume 5, Edisi 2 (Juli-Desember 2018).
- Sugista, Rizky Amalia. 2017. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa*. Skripsi Universitas Lampung (2017).
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Eidos.
- Taufik, Taufeni. 2009. *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia*. Jurnal Ekonomi, Volume 17, No. 01 (2009).
- Taufik, Taufeni. 2017. *Analysis of Factors Influence in Realization of Good Governance (Study On SKP (Tax Assessments) Pekanbaru City)*. International Journal of Applied Business and Economic Research, Volume 15, Issue 15: 279-290, Januari 2017.
- Taufeni, Taufik. 2019. *The Effect Of Internal Control System Implementation In Realizing Good Governance An Its Impact On Fraud Prevention*. International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 8, Issue 09, September 2019.
- Widyatama, Arif. 2017. *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 02, No. 02 (2017): 1-20.
- Wikipedia Ensiklopedia. 2014 “Eclipse (perangkat lunak).” Wikipedia Bahasa Indonesia. Diakses pada tanggal 8 Mei 2014.
- Wulandari, Windi. 2019. *The Effect of Compensation and Work Environment Towards Budget Manager Performance With Organization Commitment as Avariable of Mediation*. International Journal of Economics, Business and Application, Vol. 4, Issue 2 (2019): 87-99.
- Www.Tribunpekanbaru.com
- Yulisa, Febri. 2019. *The Faktors Affecting Regional Financial Accountability: Organizational Commitment as Moderating Variables (Study on Rokan Hilir District Government OPD)*. International Journal of Economics, Business and Application, Vol. 4, Issue 2 (2019): 61-73